



WTP, Kalbar Dapat *Reward* dari Kementerian Keuangan

JAKARTA-RK. Pemerintah Provinsi Kalbar kesekian kalinya mendapatkan reward dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI. Penghargaan itu diberikan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap keberhasilan pemerintah provinsi menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2012 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan pemerintah.

Piagam Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Boediono kepada Wakil Gubernur, Drs Christiandy Sanjaya, SE MM. Didampingi Menko Perekonomian, Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan, Muhamad Khatib Basri, Kepada 69 Kementerian Negara dan lembaga, serta hadir 116 pemerintah daerah.

Penyerahan tersebut dirangkaikan dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan RI, kemarin. Dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga, Badan Anggaran DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan, para pejabat pengelola keuangan dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga, para Kepala Daerah, Lembaga Internasional, Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan beberapa Institusi terkait.

Wapres Budiono dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah sangat menyambut baik dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. "Hal ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana dalam menciptakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik serta peningkatan kualitas laporan keuangan yang menghasilkan keuangan Negara yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat," ujar Boediono.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar (Wagub) Christiandy Sanjaya usai menerima penghargaan tersebut mengatakan, Kalbar patut bersyukur atas reward itu. "Kalbar mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan atas opini audit dari BPK dengan predikat WTP. Dengan penghargaan ini sesuai arahan Wakil Presiden dan Menteri Keuangan, tentunya Pemprov Kalbar akan berupaya untuk terus mempertahankan serta meningkatkan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan di daerah, karena tantangan ke depannya memang sangat berat," kata Christiandy.

Ia berharap kepada seluruh kabupaten/kota se-Kalbar yang masih belum mendapat predikat tersebut (WTP, red) untuk segera diselesaikan. "Sehingga seluruh kabupaten/kota di Kalbar bisa mendapat predikat yang sama," tandas Wagub.

Di kesempatan itu, Menteri Keuangan RI Muhamad Khatib Basri mengatakan, dilaksanakannya Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2013 ini dilatar belakangi oleh terbitnya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara.

"Diantaranya UU nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan Negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbandharaan Negara dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, efisien, ekonomis dan efektif termasuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara," papar Muhamad Khatib Basri.

Ia menjelaskan, terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, sejak tahun 2005 untuk pertama kali pemerintah pusat telah berhasil menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun



anggaran 2004 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

"LKPP tersebut setelah di audit dan diberikan opini oleh BPK RI, disampaikan kepada DPR enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dimana pada tahun-tahun sebelumnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tersebut hanya berupa perhitungan anggaran Negara yang disampaikan kepada DPR untuk dibahas menjadi UU dua tahun sesudah berakhir tahun anggaran," jelasnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya Rakernas ini, menurut Menkeu, untuk membangun sinergi diantara para pejabat pengelola keuangan Negara Kementerian Negara, Lembaga/Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang

transparan dan akuntabel, dan bersama membangun komunikasi dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi terhadap berbagai permasalahan berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara.

Selain itu, kata dia untuk menumbuhkan sinergi antara para pejabat pengelola keuangan Pemerintah, tercapainya LKPP, LKPD dan LKKL yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip good governance.

"Tercapainya opini WTP, tersedianya informasi keuangan pemerintah yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya yang berguna untuk pengambilan kebijakan, serta terlaksananya akuntansi berbasis akural dalam pelaporan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah paling lambat tahun 2015," pungkasnya.

REPORTER: ANDREAS
EDITOR: JULIANUS RATNO